

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEREMPUAN MUDA PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN

Damai Yona Nainggolan

Email: damai@student.usu.ac.id

Diterima 8 Januari 2013/ Disetujui 15 Januari 2013

Abstract

Women's poverty issues become increasingly complex because it turns out women's poverty is not only caused by the limitation of access to economic resources. There are structural problems with the cause factor and not a single constraint, tend to vary according to the conditions of political, economic and social in their neighborhood. The existence of gender inequality in various aspects of life also worsening conditions of poverty on women. This is because the dual role that they have to run, on the one hand as a housekeeper and the other side as the breadwinner of the family. This research is quantitative descriptive. The results showed a young woman from RTM have education good enough, where the majority of the already educated junior high school and senior high school, although there is still educated to elementary school or never attended school because of limited funds bench, have low skills because of the presence of the non formal education yet or training undertaken, have a desire to seek self help especially in the field of trade and agriculture, has limited capital to be able to start a business for that initial funds needed to encourage them to start trying, have the potential to alleviate themselves from poverty if given help to seek.

Keywords: Empowerment, Women, Entrepreneur

Abstrak

Persoalan kemiskinan perempuan menjadi semakin rumit karena ternyata kemiskinan perempuan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi. Ada persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal, cenderung beragam sesuai kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan mereka. Adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga semakin memperburuk kondisi kemiskinan pada kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena peran ganda yang harus mereka jalankan, di satu sisi sebagai pengurus rumah tangga dan sisi lain sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan perempuan muda dari RTM memiliki pendidikan cukup baik, dimana mayoritas sudah berpendidikan SLTP dan SLTA meskipun masih ada yang berpendidikan sampai SD atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan dana, memiliki keterampilan yang rendah karena belum adanya pendidikan non formal atau pelatihan yang diikuti, memiliki keinginan untuk berusaha mandiri terutama di bidang perdagangan dan pertanian, memiliki keterbatasan modal untuk dapat memulai usaha untuk itu diperlukan dana awal untuk mendorong mereka untuk memulai berusaha, memiliki potensi untuk mengentaskan diri dari kemiskinan jika diberi bantuan untuk berusaha.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Wirausaha

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya perempuan adalah sumberdaya insani yang memiliki potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional. Populasi penduduk perempuan Indonesia

yang cenderung bertambah terus, pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah kependudukan. Namun pada sisi lain justru memandang populasi penduduk perempuan ini sebagai suatu aset pembangunan.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengangkatan harkat dan martabat perempuan sebagai mahluk termulia bersama-sama dengan kaum pria sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Belajar dari sejarah tersebut yang lebih banyak tertampilkan adalah kaum perempuan yang sering terpinggirkan dibandingkan dengan kaum pria. Seolah-olah pengalaman sejarah itu telah menjadi sumber legitimasi masyarakat untuk mengatakan bahwa perempuan kurang beruntung. Kondisi ini terus berlanjut, sehingga kaum perempuan sendiri telah mempersepsi dan mengkonsepkan diri mereka memang tidak layak untuk menjalankan peran-peran tertentu dalam pembangunan. Namun demikian, pada suatu saat ternyata perjalanan sejarah itulah yang membuktikan juga bahwa kaum perempuan telah salah mempersepsi dan mengkonsepkan diri mereka sendiri. Munculnya pahlawan-pahlawan perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia baik dalam masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan adalah salah satu bukti monumental ternyata perempuan mampu mengaktualisasikan diri secara berdayaguna untuk kepentingan bangsa.

Mencermati fenomena-fenomena keperempuanan seperti yang diuraikan tersebut di atas mengimplikasikan suatu permasalahan yang sangat penting ialah pemberdayaan perempuan. Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan pada kenyataannya masih banyak yang belum dapat terbedaya karena berbagai faktor penyebab yang melatar belaknginya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi

pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. Berhubung begitu pentingnya masalah pemberdayaan perempuan ini, maka adalah wajar dalam Rakernas Pembangunan Peranan Perempuan yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan pada tahun 1999 menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu dari lima agenda pokok (Kantor Menteri Peranan Perempuan, 1999).

Saat ini fenomena perempuan bekerja bukan lagi barang aneh dan bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, yang dapat menaikkan harkat perempuan, yang sebelumnya selalu dianggap hanya sebagai pengurus anak, suami dan rumah tangga semata-mata. Bahkan sebelumnya banyak gagasan dan stereotip tentang perempuan sebagai omongan yang acuh tak acuh pada lingkungan, bodoh dan kurang memiliki kemampuan yang akhirnya merendahkan martabat perempuan (Wolfman, 1989). Pendapat seperti ini biasanya juga tidak berdasar dari belenggu nilai-nilai tradisional yang menjadi tekanan sosial yang mengakar dari pendapat kuno para bangsawan, bahwa perempuan harus selalu ingat akan masak, macak dan manak (memasak, bersolek dan melahirkan anak) sebagai tugas utamanya. Sekarang perempuan dituntut aktif secara ekonomi, meskipun disisi lain ada juga tuntutan agar perempuan yang berkeluarga dapat menghasilkan uang tanpa mengganggu fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Penelitian lain yang terkait dengan pekerjaan perempuan dan Revolusi Hijau pada masyarakat Asia dan Afrika adalah penelitian dalam Saptari & Holzner, (1997) tentang dampak perubahan-perubahan yang disebabkan oleh Revolusi Hijau. Palmer menyatakan bahwa penentu utama perubahan-perubahan dalam pekerjaan perempuan adalah :

1. Intensitas tenaga kerja untuk penanaman pada kondisi yang telah ada sebelumnya.
2. Persyaratan teknis yang obyektif dari metode yang baru (atau tanaman yang baru).
3. Pembagian kerja secara seksual pada keadaan sebelumnya.
4. Bentuk-bentuk mekanisme yang diperkenalkan.
5. Kelas sosial perempuan. Sebuah studi tentang perempuan di sektor informal (Wahyuni, 1990), menunjukkan dua hal, yaitu :
 - a. Perempuan dominan di sektor informal baik di desa maupun di kota.
 - b. Mereka berkonsentrasi dalam suatu aktivitas di sektor informal yang sempit dengan imbalan yang rendah.

Dengan pemberdayaan perempuan, harapannya adalah agar mereka mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, punya keberanian untuk mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Sebab, *“pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan”* (Pranarka dan Moeljarto, 1996). *“Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutuskan atau *break down* dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek”*. Menurut Soetrisno, (1997) bahwa ada lima tugas utama perempuan yang disebut *“Panca Tugas Perempuan”*. Kelima panca tugas perempuan itu adalah : (1) sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan

bangsa; (3) sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga; (4) sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.

Pemberdayaan perempuan di Kota Medan antara lain bisa dilakukan dengan menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya mereka. Oleh karena itu perlu motivasi dan adanya strategi tepat guna dan hasil guna dengan cara memberdayakan mereka. Mereka tidak hanya obyek pembangunan saja tetapi juga harus mampu menjadi subyek bahkan kalau mungkin menjadi aktor pembangunan. Harapannya dapat membebaskan mereka dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan.

Ketika Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 1998, banyak orang mendadak menjadi miskin. Mereka kehilangan pekerjaan, sementara harga kebutuhan pokok melambung. Dari mereka yang jatuh miskin, kelompok termiskin adalah perempuan kepala keluarga. Mereka menjanda karena suami meninggal atau bercerai, tetapi tidak sedikit yang ditinggal suami bertahun-tahun tanpa kabar berita.

Berbagai upaya dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, namun demikian tetap saja masih ada rumah tangga yang berada dalam kemiskinan. Saat ini kemiskinan kronis berkisar antara 5-7% dan 10-15% penduduk lainnya mengalami kemiskinan *transien*, yaitu keluar-masuk dari status miskin (Moeis, 2008).

Di sisi lain, ternyata sebahagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta diantaranya adalah sebagai kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 10.000,- perhari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga mereka, pada umumnya mereka bekerja di sektor informal (*terutama perdagangan dan jasa*), sektor pertanian sebagai buruh tani dan buruh pabrik. Mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi, terutama sumberdaya keuangan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh alasan bahwa mereka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, ketiadaan jaminan, lokasi yang terpencil, dan tidak jarang pula kondisi ini terkait dengan isu gender (Nani, 2004).

Persoalan kemiskinan perempuan menjadi semakin rumit, karena ternyata kemiskinan perempuan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi. Disini ada persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal, cenderung beragam sesuai kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan mereka. Adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga semakin memperburuk kondisi kemiskinan pada kaum perempuan.

Fakta menunjukkan bahwa beban perempuan miskin lebih besar ditemukan oleh Birdshall & McGreevey, 1983 (dalam Rasita, 2007). Hal ini disebabkan karena peran ganda yang harus mereka jalankan, di satu sisi sebagai pengurus rumah tangga dan sisi lain sebagai pencari nafkah keluarga. Sebagai pengurus rumah tangga perempuan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengambil air, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mengatur keuangan rumah tangga, dimana semua aktivitas ini dianggap bukanlah sebuah "pekerjaan", sehingga tidak pernah diperhitungkan sebagai hasil "produksi"

dalam suatu rumah tangga. Sebagai pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya, seringkali pendapatan yang diperoleh kaum perempuan dianggap hanya sebagai "tambahan" bagi pendapatan suami.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi lahan berusaha para penduduk miskin ternyata masih tergolong pada usaha marginal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian, sejumlah kajian yang telah dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha ini merupakan komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan berpotensi untuk dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga (ADB Report dalam Semeru, 2003).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi pemberdayaan dan pengembangan entrepreneur perempuan muda pada rumah tangga miskin di Kota Medan Sehingga penulis merumuskan masalah penelitian yaitu Implementasi Pemberdayaan Dan Pengembangan Entrepreneur Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin Di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang memberikan penggambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data primer maupun sekunder untuk menjelaskan penilaian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai implementasi pemberdayaan dan pengembangan entrepreneur perempuan muda pada rumah tangga miskin di Kota Medan. Sampel penelitian perempuan

muda yaitu perempuan berumur 15 tahun sampai dengan 30 tahun dari Rumah Tangga miskin di Kecamatan tidak diketahui. Berdasarkan perhitungan luas wilayah kecamatan Medan Deli dibagi dengan jumlah penduduk miskin maka sampel ditentukan sebanyak 100 orang daerah penelitian perempuan muda dari Rumah Tangga miskin di Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

TELAAH PUSTAKA

Wanita Dalam Negara Berkembang

Di negara-negara dunia ketiga, masyarakat yang hidup di dalam lingkaran kemiskinan adalah masyarakat yang hidup di dalam keluarga yang dikepalai oleh wanita, karena dalam keluarga tersebut tidak ada pria yang mampu menafkahi keluarganya (Todaro & Smith, 2006). Kondisi demikian juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan yang kemudian membentuk sebuah program yang melindungi hak-hak para wanita yaitu PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Data Susenas Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 ketika PEKKA pertama digagas yang kurang dari 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Selain itu, nilai social budaya umumnya juga masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial

masyarakat. Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya (PEKKA, 2010).

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (Pekka) yang rendah. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa Pekka umumnya berusia antara 20 - 60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Sebagian wanita menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari.

Sebagian wanita mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah termasuk pembatasan hak-hak wanita dalam kegiatan ekonominya. Terlepas dari semua kondisi kehidupan wanita yang memprihatinkan, wanita khususnya yang hidup di negara berkembang sebenarnya memiliki peran tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan beberapa bukti empiris, tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi pendidikan kaum wanita lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum pria. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dapat memberikan produktivitas kerja yang lebih tinggi dibanding kaum pria. Bahkan dengan pendidikan wanita yang lebih tinggi, untuk jangka panjang wanita tersebut dapat menjamin kualitas intelegensi anak - anaknya sehingga berguna untuk masa depan, dapat mengurangi tingkat fertilitas karena pada umumnya wanita yang bekerja menunda untuk menikah muda sehingga momentum ledakan penduduk dapat dikurangi.

Apalagi jika dilengkapi dengan efektifnya program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui ibu-

ibu PKK dan program-program simpan pinjam khusus untuk wanita. Dalam dunia kerja, saat ini semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam dunia kerja (ekonomi). Akan tetapi, tren ini hanya umum dijumpai di kotakota besar saja. Segmen masyarakat termiskin di Dunia Ketiga hidup dalam rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Potensi wanita dalam membuat pendapatan sendiri juga jauh lebih rendah daripada potensi yang dimiliki oleh pria sehingga wanita dan keluarga yang diasuhnya merupakan anggota tetap kelompok masyarakat yang paling miskin. Pada umumnya, para wanita yang ada didalam rumah tangga yang dikepalai seorang wanita memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

Di samping beban berat yang harus ditanggung para wanita tersebut karena menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan pangan per kapita. Sebagian dari disparitas atau kesenjangan pendapatan antara keluarga-keluarga yang dikepalai oleh pria dan wanita itu bersumber dari adanya perbedaan pendapatan yang sangat besar antara pria dan wanita. Selain upah buruh wanita biasanya lebih rendah (meskipun porsi dan beban kerjanya sama), wanita juga sulit mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi. Wanita hanya bisa bekerja dibidang kerja yang berpenghasilan rendah atau berproduktivitas rendah, bahkan yang ilegal. Artinya, wanita terpaksa bekerja di sektor tertentu, misalnya saja di sektor garmen, yang belum menerapkan regulasi dan ketentuan upah minimum atau berbagai peraturan perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan tunjangan sosial serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai.

Definisi dan Pengukuran Kemiskinan

David Cox (Ade Cahyat, 2004) menyatakan bahwa kemiskinan tidak

berputar pada satu titik saja melainkan berada dalam beberapa dimensi. Ada kemiskinan yang diakibatkan oleh era globalisasi yang mana era tersebut menyebabkan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pada umumnya yang menang adalah negara maju sedangkan negara berkembang semakin terpinggirkan. Kemudian, ada kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan seperti kemiskinan subsisten atau kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan, kemiskinan pedesaan yang terjadi justru karena efek samping dari laju pembangunan sehingga daerah pedesaan semakin terpinggirkan, dan kemiskinan perkotaan yang sudah menjadi hakekat dari akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian eksternal seperti bencana alam, tingginya jumlah penduduk, serta konflik dinamakan kemiskinan kensekuensial. Terakhir, kemiskinan yang paling kasat mata adalah kemiskinan sosial yang dialami oleh kelompok minoritas, anak-anak dan kaum perempuan.

Indikator-indikator BKKBN yang mengobservasi karakteristik sosial ekonomi, seperti frekwensi makan anggota keluarga dalam sehari, pemilikan pakaian yang berbeda-beda tersedia untuk individu dalam setiap kegiatan yang berbeda (dirumah, bekerja, sekolah, dan bepergian), kondisi lantai rumah (tanah, kayu, semen), perilaku keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan bahkan perilaku anggota keluarga melaksanakan aktifitas keagamaan sebagai prekondisi dari keinginan untuk memberikan harta seseorang untuk yang memerlukan semuanya didasarkan norma keluarga kecil (nuclear family) dan sejahtera tanpa memperhatikan tekanan untuk saling membantu diantara jaringan keturunan dan tetangga (Ritonga Homotangan, 2001).

Ukuran Rumah Tangga Miskin

Indikator rumah tangga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8 meter per anggota rumah tangga
2. Jenis lantai dari tanah
3. Dinding rumah kayu atau bambu
4. Tidak memiliki fasilitas MCK
5. Sumber air minum bukan PDAM
6. Penerangan bukan listrik
7. Hanya mampu membeli daging maksimal 1 kali sepekan
8. Frekuensi makan maksimal dua kali sehari
9. Dalam setahun hanya mampu membeli 1 stel pakaian
10. Tidak mampu berobat ke Puskesmas jika sakit
11. Lapangan pekerjaan buruh tani, buruh bangunan dan lainnya
12. Pendapatan total rumah tangga di bawah Rp 600 ribu per bulan
13. Pendidikan tertinggi tidak tamat sekolah dan tidak tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan
15. Barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp 500 Ribu, dan
16. Tidak memiliki kompor untuk memasak.

Pemberdayaan Masyarakat

Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab

menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut Kartasmita (1996 : 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transformasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999 : 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok

sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Pengembangan SDM

Dalam kaitannya dengan penyerahan kewenangan sumber daya manusia, aspek pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan. Pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia mempunyai dimensi luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi (Wayne dan Awad, 1981:29). Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik

akan dapat menghemat sumber daya lainnya atau setidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya organisasi dapat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan (Siagian, 1996:182). Kondisi "*conditio sine quanon*" ini dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi yaitu human investasi.

Meskipun program orientasi pengembangan ini memakan waktu dan dana, semua organisasi mempunyai keharusan untuk melaksanakannya, dan menyebut biaya-biaya untuk berbagai program tersebut sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Ada dua tujuan utama dalam hal ini, pertama, pengembangan dilakukan untuk menutup "*gap*" antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Kedua, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang ditetapkan. (Handoko, 1998: 103).

Pencapaian keselarasan tujuan tersebut tentunya harus ditempuh melalui suatu proses tahapan panjang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan dan pemeliharaan potensi sumber daya manusia. Karena secara makro Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia, yaitu mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (Notoatmodjo, 1998:2-3).

Dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian, sehingga dapat

memegang tanggungjawab dimasa yang akan datang (Handoko, 1998 : 104).

Pada sisi lain pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sebatas menyangkut internal sumber daya manusia sendiri (yaitu antara lain pengetahuan, kemampuan, sikap, tanggung jawab) namun juga terkait dengan kondisi eksternal, seperti lingkungan organisasi dan masyarakat. Hal ini tercermin dari tuntutan pengembangan sumber daya manusia sendiri yang pada dasarnya timbul karena pertimbangan:

1. pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran.
2. masyarakat selalu berkembang dinamis dengan mengalami pergeseran nilai-nilai tertentu.
3. persamaan hak memperoleh pekerjaan
4. kemungkinan perpindahan pegawai yang merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasional (Siagian, 1996:199).

Berbagai tuntutan tersebut secara bersamaan saling mempengaruhi pelaksanaan dan arah pengembangan sumber daya manusia, baik menyangkut internal manusianya maupun lingkungan eksternal. Pada bagian lain dalam skop organisasi, faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia ini dapat dibagi kedalam faktor internal yaitu dapat mencakup keseluruhan kehidupan yang dapat dikendalikan organisasi, meliputi :

1. misi dan tujuan organisasi.
2. strategi pencapaian tujuan.
3. sifat dan jenis pekerjaan
4. jenis teknologi yang digunakan. Serta faktor eksternal, yang meliputi :
 - a. kebijaksanaan pemerintah.
 - b. sosio budaya masyarakat.
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Notoatmodjo, 1998 : 8-10).

Secara khusus dalam pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut peningkatan segala potensi internal kemampuan diri manusia ini

adalah didasarkan fakta bahwa seseorang karyawan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang ditemui selama karier.

Dalam hal ini merupakan persiapan karier jangka panjang seseorang. (Simamora, 1995:287). Sehingga cakupan pengembangan sumber daya manusia selanjutnya adalah terkait dengan sistem karier yang diterapkan oleh organisasi dan bagaimana sumber daya manusia yang ada dapat mengakses sistem yang ada dalam rangka mendukung harapan-harapan kerjanya (Simamora, 1995:323).

Ciri-ciri Entrepreneur

Entrepreneur adalah orang yang memiliki keberanian untuk "berdiri di atas kaki sendiri", dengan keyakinan dan kemampuan sendiri melahirkan suatu karya dan usaha untuk kemajuan diri sendiri dan lingkungannya dengan tetap berlandaskan pada kebenaran dan kebajikan (Sumahamijaya, 1971). Mereka ini memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan yang bukan entrepreneur. Anggadireja dan Djajamiharja (1991); Byres, dkk, (1997) dan Lichter, dkk, (1983) mengidentifikasi karakteristik entrepreneur berdasarkan hasil eksperimen yang mereka lakukan. Beberapa sifat yang sering di sebutkan adalah seperti:

1. Memiliki energi atau semangat yang tinggi
2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi
3. Memiliki komitmen dan kemampuan untuk mencapai tujuan
4. Memiliki keyakinan diri untuk mampu mengontrol takdir
5. Memiliki kemampuan memperhitungkan resiko

Kemiskinan dan Peran Kaum Perempuan.

Ada banyak defenisi dan konsep tentang kemiskinan, kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik yang dapat

menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan masyarakat. World Bank membagi dimensi kemiskinan menjadi empat hal pokok; yaitu: *lack of opportunity, lack of capabilities, low level security, dan low capacity*. Oleh sebab itu, kemiskinan tidak dapat didefinisikan dengan sederhana, karena masalah kemiskinan tidak hanya terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, akan tetapi juga sangat terkait dengan dimensi kehidupan yang lain (Dewi, 2005).

Selanjutnya, ketidakadilan gender juga dapat memicu munculnya masalah kemiskinan bagi kaum perempuan, adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mendorong terjadi kemiskinan pada kaum perempuan adalah (Rasita, 2007) :

- a. Marginalisasi ekonomi, diantaranya lemah dan terbatasnya akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, seperti tanah, permodalan dan pemasaran
- b. Subordinasi terhadap perempuan, bermakna pada keterbatasan akses kaum perempuan dalam pengambilan keputusan bahkan untuk keputusan yang menyangkut dirinya sendiri.
- c. Kelebihan beban kerja, dimana perempuan dituntut untuk menjalankan peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan istilah "*triple burden women*".
- d. Nilai negatif (*Stereotype*) terhadap perempuan, dimana perempuan seringkali digambarkan sebagai individu yang emosional, lemah, tidak mampu memimpin dan tidak rasional, akibatnya menutup kesempatan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang aktivitas ekonomi, sosial dan politik.
- e. Tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, baik fisik maupun mental psikologis.

Diakui atau tidak, kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga

dan nasional merupakan bagian yang penting dalam proses dan upaya pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan perempuan dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya, maka kemampuan dan kesempatan kaum perempuan untuk bernegosiasi dalam rumah tangga juga akan meningkat, karena dengan peningkatan pendapatan ini gagasan dan pendapat kaum perempuan akan diperhitungkan pula dalam proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Lebih jauh lagi, keberadaan perempuan pengusaha dalam aktivitas ekonomi dewasa ini telah menampakkan peran dan spektrum yang luas di tengah-tengah masyarakat, karena ternyata tidak hanya mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan keluarga tetapi juga bagi peningkatan terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Hal ini dapat dilihat dari proporsi kaum perempuan dalam UMKM adalah sebesar 40% (Tamim, 2008):

Sehubungan dengan usaha kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, ada beberapa kendala umum yang dihadapi ketika mereka mengelola usahanya. Diantaranya adalah masalah kualitas SDM, keterbatasan permodalan, kemampuan teknologi, bahan baku, distribusi dan pemasaran serta kelemahan pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen usaha.

Disisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi ternyata juga memberikan dampak positif bagi perempuan pekerja dimana dengan adanya kemajuan teknologi ini telah terjadi perubahan karakteristik pada bidang pekerjaan tertentu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh kaum pria saat ini telah bisa dimasuki dan dikerjakan oleh kaum perempuan. Dengan demikian kaum perempuan memiliki kesempatan yang semakin besar untuk memasuki dunia kerja dan berpartisipasi dalam berbagai

aspek perekonomian, tentunya dengan tetap memperhatikan karakteristik perempuan sebagai makhluk Tuhan yang diberi tanggungjawab lebih besar untuk mendukung kesejahteraan dan keberhasilan keluarga. Hal ini memperlihatkan posisi strategis kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Salah satu karakteristik kaum perempuan yang sekaligus merupakan keunggulannya yang perlu terus ditumbuh kembangkan terutama bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan UMK adalah kesabaran dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan. Karakter ini mendorong untuk semakin luasnya cakupan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan dan mungkin kurang diminati oleh kaum pria. Dan bagi UKM sendiri, ketelitian dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mendorong keberhasilan usaha ini mengingat masalah permodalan merupakan kendala yang cukup besar dalam mengembangkan usaha ini (Syarif, 2007).

Wamuyu, dkk (2005), melakukan studi terhadap perempuan muda dengan kasus perempuan di wilayah pedesaan Malaysia, dan menggunakan pendekatan ekonomi, sosial, psikologi, manajemen bisnis dan gender menemukan bahwa *scaling-up model* dapat digunakan untuk mendorong peningkatan ekonomi perempuan pedesaan. Hal ini didorong oleh kenyataan dimana secara tradisional kaum perempuan telah terlibat di dalam bisnis berskala mikro yang dilakukan secara individu maupun bersama suami. Sehingga sangatlah beralasan jika menjadikan usaha mikro ini sebagai basis bagi pengembangan entrepreneur perempuan dalam rangka kesinambungan ekonomi keluarga.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan telah disusun sebuah model pengembangan

entrepreneur perempuan muda RTM Kecamatan Medan Deli. Model ini menjelaskan bahwa pengembangan entrepreneur didasarkan pada kondisi RTM, setelah itu dilakukan intervensi untuk mengatasi kelemahan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kredit Mikro atau Perbankan secara umum, perantau, dan perusahaan swasta. Setelah dilakukan penguatan maka terhadap pengetahuan, keterampilan serta jiwa entrepreneur maka mereka akan diberi modal. Sebelum diberi dana dilakukan seleksi untuk mengetahui mana diantara mereka yang benar benar memiliki potensi. Setelah itu dilanjutkan dengan monev dan pendampingan terhadap kegiatan yang mereka lakukan.

Lebih lanjut model tersebut dapat di jelaskan dengan ringkas sebagai berikut. Individu yang memiliki potensi pribadi dan entrepreneurship walau ada berbagai keterbatasan yang mereka miliki akan mendapat dilakukan penguatan. Diantara beberapa kelemahan yang dihadapi antara lain adalah rendahnya keterampilan, sifat entrepreneurship yang juga rendah serta keterbatasan dana awal untuk memulai usaha. Pertama akan dilakukan penguatan dengan meningkatkan sikap entrepreneurship dan kemampuan manajerial serta teknis sampai mereka memiliki untuk dapat menjalankan usaha. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan,

Berbagai pihak yang disebutkan tadi seperti pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, dan Lembaga Kredit Mikro dan pihak swasta akan berperan sebagai fasilitator, pendamping, evaluator dan mitra usaha. Peran dari masing ini perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki dan mengetahui tupoksi sesuai dengan kompetensi mereka. Perguruan Tinggi melalui Dharma Pengabdian Masyarakat berperan sebagai fasilitator, pendamping dan evaluator. PT dalam meningkatkan kemampuan manajerial,

teknis dan entrepreneurship pada perempuan muda miskin.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam mensupport pertama dari segi pendanaan ataupun modal awal untuk program ini dengan jalan mengalokasikan skema pinjaman yang sifatnya mudah di akses, tidak banyak persyaratan dan berbiaya murah untuk pendirian usaha baru. Pada sisi lain pihak swasta juga dapat berkontribusi melalui Program kegiatan *Corporate Social Responsibility* mereka sebagai pihak penyandang dana untuk menyediakan modal awal atau berperan juga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan atau mitra.

Setelah mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, mentalitas untuk melakukan usaha mereka diberi modal awal untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan minat mereka masing-masing serta sumber daya yang mereka miliki. Untuk efektifnya pemberian dana maka sebelum dana disalurkan perlu dilakukan seleksi. Mereka yang memiliki kriteria: memiliki keterampilan, kemauan dan semangat berusaha yang akan di beri modal atau setidaknya diprioritaskan untuk mendapat dana. Perempuan muda yang telah mendapat dana akan mendapat pendampingan dan usaha mereka di monitor dan dievaluasi dalam periode tertentu. Untuk efektifnya pelaksanaan model yang diusulkan perlu sebuah mekanisme pendampingan termasuk organisasi pelaksana sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat di Kecamatan Medan Deli Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya komunikasi dan informasi yang kurang menyentuh ke masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan pelaksanaan dan penyelenggaraan program

pengembangan dan pemberdayaan entrepreneur.

2. Perkembangan dan kualitas pelatih sangat membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas sarana dan prasarannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan perempuan muda adalah;
 - a. Komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat belum berjalan dengan baik.
 - b. Disposisi dari pelaksana sangat mendukung pelaksanaan program ini, berdasarkan hasil penelitian didapatkan jika para guru/kepala sekolah bersemangat melaksanakan program ini. Struktur birokrasi yang ada di kecamatan Medan Deli cukup rumit dan kompleks sehingga kurang mendukung pelaksanaan program ini. Dan dianggap masih kurang transparan.
 - c. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah Kota di bidang wirausaha mandiri di nilai stagnan hingga persepsi masyarakat menilai kinerja pada tingkatan "buruk".
 - d. Adapun faktor yang menjadi pendukung adalah para implementator dapat bekerjasama yang baik dan konsisten.
 - e. Kepala RTM mayoritas adalah pria dengan jumlah tanggungan keluarga antara 0-10 orang, dan memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian.
 - f. Terdapat 44% perempuan muda berstatus kawin.
 - g. Perempuan muda dari RTM memiliki pendidikan cukup baik, dimana mayoritas sudah berpendidikan SLTP dan SLTA meskipun masih ada yang berpendidikan sampai SD atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan dana.

- h. Perempuan muda dari RTM memiliki keterampilan yang rendah karena belum adanya pendidikan non formal atau pelatihan yang diikuti.
- i. Perempuan muda dari RTM memiliki keinginan untuk berusaha mandiri terutama di bidang perdagangan dan pertanian
- j. Perempuan muda dari RTM memiliki keterbatasan modal untuk dapat memulai usaha untuk itu diperlukan dana awal untuk mendorong mereka untuk memulai berusaha
- k. Kondisi daerah dan infrastruktur yang ada sudah cukup memadai untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan muda dari RTS.
- l. Perempuan muda dari RTM memiliki potensi untuk mengentaskan diri dari kemiskinan jika diberi bantuan untuk berusaha.

Saran

Untuk dapat mengembangkan potensi perempuan muda RTM agar dapat mengentaskan diri mereka dan bahkan keluarganya dari kemiskinan maka sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta dan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak untuk peduli pada masalah kemiskinan ini dan membantu dalam upaya pengentasannya.

- a. Pada pemerintah Kota diharapkan agar dapat mensinkronisasikan berbagai program pengentasan kemiskinan baik dari tingkat pusat maupun provinsi dengan program daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penumpukan yang berakibat pada semakin “manjanya” masyarakat miskin.
- b. Program KMN yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota di Kecamatan Medan Deli, sebaiknya difokuskan pada perempuan muda

yang potensial yang memiliki jiwa *entrepreneur* untuk berusaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi pengentasan kemiskinan di wilayah ini.

- c. Partisipasi perusahaan milik daerah dan swasta sangat dibutuhkan untuk membantu penanggulangan masalah kemiskinan, untuk itu diharapkan program CSR perusahaan juga dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan muda RTM.
- d. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, baik yang berada di wilayah Kecamatan Medan Deli maupun yang merantau diharapkan partisipasinya untuk turut membantu perempuan muda dari RTM ini keluar dari lingkaran kemiskinan.
- e. Lebih mengembangkan potensi *entrepreneur* perempuan muda pada RTM melalui pelatihan dan pemagangan sehingga akan mendorong lahirnya keinginan dan aksi menjalankan usaha mandiri
- f. Dalam pengembangan usaha untuk perempuan muda RTM yang sejalan dengan potensi daerah yaitu pada pengembangan *agro bussiness*
- g. Perguruan tinggi melalui Dharma Pengabdian Pada Masyarakat dapat memberikan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan muda serta memperkuat sifat *entrepreneurship* sebagai bekal untuk membuka usaha
- h. Mengaktifkan seluruh potensi lembaga keterampilan yang ada di daerah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) untuk berperan memfasilitasi peningkatan keterampilan perempuan muda RTM
- i. Perlu dikembangkan penyaluran zakat produktif bagi perempuan muda dari RTM ini agar mereka dapat berusaha dan keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, 2005, Mengeliminir Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Kualitas SDM, Jurnal Pembangunan Manusia, 2005.
- Criswardani Suryati, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional”, JMPK Vol 8/No. 03/September 2005.
- Chinese Taipei, 2002, Women Entrepreneur, IMF Country Report No.01/51.IMF.**
- Dewi Mayavanie S, (2005), Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan), Work Paper.**
- Jhon, C, Allan, (2007), Morphing Rural Community Development Models: the Nexus Between The pass and The Next”, Comunity Investment, Spring Edition.
- Jossy Moeis, 2008, Perubahan Cara Pandang Terhadap Kemiskinan sebagai Basis Penanggulangan Kemiskinan, Makalah Seminar Sehari: “ Menaggulangi Kemiskinan dengan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah di Era Krisis Global”, FEUA, 6 November 2008, Padang.
- Khofifah Indar Parawansa, 2003, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan; Makalah Semiloka, 15 Juli 2003, Denpasar Bali.
- Pacific Women’s Resource Bureau , 1999, Gender and Entrepreneurial Development for Women: A Sitation Analysis Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu), New Caledonia.
- Lembaga Penelitian SMERU & Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2003, Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan, Laporan Penelitian.
- Nani Zulminanrni, 2004, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin, Makalah Workshop “ Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indoensia, 27 Agustus 2004, Jakarta.
- Noer Sutrisno, 2001, Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Makalah.
- Rasita Ekawati P, 2007, Pentingnya GPI (Gender and Poverty Inclusive), Senior Project Officer Monev , ACCESS.
- Saikou. E. Sanyang & Wen Chi Huang, 2008, Green Cooperative: A Strategic Aproach Women’s Entrepreneurship in Asian and Pasific Region, World Jornal of Agricultural Sciences 4, page 674-683
- Steve, J, Liscter, dkk, (1983), Entrepreneur Potensial: An experimental Exercise in Self Analysis and Group Assesment, Journal of Developments in Bussiness Simulation& Experiential Exercises, Vol 10.
- Syahyuti, 2002, Berbagai Pola Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Makalah Sarasehan Nasional “ Microfinance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan, 27 Agustus 2002, IPB Bogor.
- Tamim Saefuddin, 2008, Program. Perempuan Keluarga Sehat & Sejahtera (PERKASSA) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita, makalah.

Teuku Syarif, 2007, Koperasi Sebagai
Bankeer Kaum Perempuan,
Makalah.

Todaro, Michael dan Stephen Smith, 2008.
Economic Development, Longman:
New York, USA.

Wamuyu Gikonyo, dkk, 2005,
Empowering Young Women through
Micro-Enterprise Scaling-Up: A Case of
Malaysian Rural Women (A concept
paper).